



LAPORAN AKTUALISASI

**PENGELOLAAN KEUANGAN DPA BIDANG PEMENUHAN HAK
DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SULAWESI SELATAN**

DISUSUN OLEH :

NAMA : SYAHDANI ICHZAN SYAHIR, S.STP
KELAS : A2
NO. ABSEN : 36

**PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOL. III
BAGI PURNA PRAJA IPDN ANGKATAN XXIV
GELOMBANG I**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2018**

DESKRIPSI SINGKAT

Pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pelaksanaan APBD diharapkan bisa meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan pembangunan daerah. Hal ini merupakan suatu proses terhadap keterlibatan dari segenap unsur dan lapisan masyarakat, untuk dapat memberikan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya berdasarkan aspirasi masyarakat. Sehingga aspirasi dari masyarakat dapat tercapai.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, setiap pemerintah daerah tentunya harus melakukan pelaksanaan, penatausahaan APBD, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terkait keuangan daerah. dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah menuntut keseriusan dari pemerintah. Dengan mengacu kepada prinsip-prinsip *good governance* dan sejalan dengan regulasi yang ada. Untuk itu peran pengelolaan keuangan sangatlah penting dalam mengelola keuangan daerah maupun keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).